



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 03 TAHUN 2008

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pembiayaan Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 145 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor Tahun 43 Tahun 2006 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk dimaksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum sebelum melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf d dibayarkan secara Rill (at cost), namun dapat dipanjarkan sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (3) Biaya lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan paling lama 5 (lima) hari diluar Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang yang besarnya sebagaimana terdapat pada lampiran ke 1 dan 2 Peraturan ini.
- (4) Perjalanan Dinas jabatan pergi dan pulang ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran 4 Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Eselon II, Eselon III Pimpinan SKPD dan Eselon III pada SKPD dan Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata diberikan fasilitas kendaraan Dinas Roda 4 (empat) maupun Roda 2 (Dua) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah dibayarkan secara lumpsum yang besarnya sebagaimana tersebut pada lampiran 4 Peraturan ini.
- (3) Tingkat Perjalanan Dinas untuk Kelas Bisnis diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Kelas Ekonomi untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II kebawah.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan ketempat yang dituju (Pergi – Pulang) diluar Wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut pada lampiran 3 Peraturan ini.
- (2) Standar nilai Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan sampai dengan 1.500 CC 1 Liter jarak tempuh 7 (tujuh) Km.
 - b. Kendaraan sampai dengan 1.800 CC 1 Liter jarak tempuh 6 (enam) Km.
 - c. Kendaraan sampai dengan 2.000 CC 1 Liter jarak tempuh 5 (lima) Km.
 - d. Kendaraan sampai dengan 3.200 CC 1 Liter jarak tempuh 4 (empat) Km.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kerja Kabupaten Luwu Timur ditetapkan 1 (satu) hari kecuali ada hal yang ditentukan lain atas persetujuan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas dalam Wilayah kerja Kecamatan bagi pegawai SKPD kecamatan dan Puskesmas satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana tersebut dalam lampiran 4 Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan atau pejabat yang diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas keluar Kab. Luwu Timur, untuk pejabat Eselon II dan Eselon III kepala SKPD dengan persetujuan prinsip oleh Bupati.
 - b. Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk pejabat Eselon III dan IV persetujuan prinsip oleh Kepala SKPD.
 - c. Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur persetujuan prinsip pejabat satu tingkat di atasnya dan pimpinan SKPD bagi staf yang dipimpinnya.

Pasal 8

- (1) Uang harian diberikan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya transport pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam dan keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur selain yang diatur dalam Pasal 4, diberikan biaya transport kendaraan umum sesuai ketentuan yang berlaku dan dibayarkan bersama dengan lumpsum sebelum berangkat.
- (3) Biaya penginapan hanya diberikan bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur dan dibayarkan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari perjalanan dinas yang ditentukan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 A Peraturan ini.
- (4) Satuan biaya tiket pesawat yang dapat dipanjarkan bagi yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Propinsi dan ke luar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran 5 Peraturan ini.

Pasal 9

Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bintek, lokakarya dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi biaya pelaksanaan, tidak diberikan uang makan dan biaya penginapan menurut jumlah hari pelaksanaan.

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas/Pejabat Keluar Negeri, Perjalanan Pindah dan Biaya Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 145 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 43 Tahun 2006 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008;
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 090/134/BAKD tanggal 13 Februari 2008 perihal Penjelasan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.05/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya paling dekat 5 (lima) Km dari batas Kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara dan atau Daerah sesuai perintah Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan satuan kerjanya.
- (3) Tempat Kedudukan adalah tempat /kota kantor/satuan kerja berada.
- (4) Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
- (5) Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- (6) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keterangan Dokter/Rujukan penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk.

Pasal 2

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Uang harian yang meliputi Uang Makan, Uang saku dan Transport Lokal.
 - b. Biaya Penginapan.
 - c. Uang Representase
 - d. Biaya Transport Pegawai.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Pejabat Eselon III, Eselon IV, Non Eselon dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan Biaya perjalanan Dinas sebagaimana diatur pada ayat (1) diatas kecuali pada huruf c.

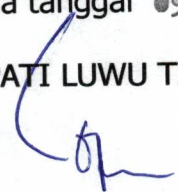
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

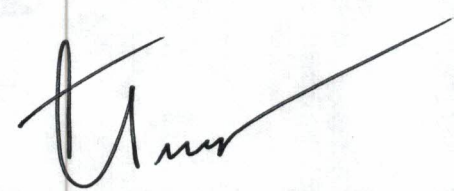
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 09 Mei 2008

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 09 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 03.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAH KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. BADAN	
KABID / SEKRETARIS <i>Alcantari/Hekta</i>	<i>B. / BS</i>
KASUBID / KASUBAG <i>Derene. Anggon</i>	<i>R.</i>

Lampiran 1 Peraturan Bupati Luwu Timur

Nomor : 03 Tahun 2008

Tanggal : 09 Mei 2008

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO.	DAERAH TUJUAN	UANG HARIAN			JUMLAH
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU	
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	100,000	100,000	100,000	300,000.00
2	SUMATERA UTARA	100,000	100,000	100,000	300,000.00
3	R I A U	100,000	100,000	100,000	300,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	100,000	100,000	100,000	300,000.00
5	J A M B I	100,000	100,000	100,000	300,000.00
6	SUMATERA BARAT	100,000	100,000	100,000	300,000.00
7	SUMATERA SELATAN	100,000	100,000	100,000	300,000.00
8	LAMPUNG	100,000	100,000	100,000	300,000.00
9	BENGKULU	100,000	100,000	100,000	300,000.00
10	BANGKA BELITUNG	100,000	100,000	100,000	300,000.00
11	BANTEN	100,000	100,000	100,000	300,000.00
12	JAWA BARAT	100,000	150,000	100,000	350,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	150,000	200,000	100,000	450,000.00
14	JAWA TENGAH	100,000	100,000	100,000	300,000.00
15	D.I. YOKYAKARTA	100,000	150,000	100,000	350,000.00
16	JAWA TIMUR	100,000	150,000	100,000	350,000.00
17	BALI	150,000	150,000	100,000	400,000.00
18	NUSA TINGGARA BARAT	100,000	150,000	100,000	350,000.00
19	NUSA TINGGARA TIMUR	100,000	100,000	100,000	300,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	100,000	100,000	100,000	300,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	100,000	100,000	100,000	300,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	100,000	100,000	100,000	300,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	100,000	150,000	100,000	350,000.00
24	SULAWESI UTARA	100,000	100,000	100,000	300,000.00
25	GORONTALO	100,000	100,000	100,000	300,000.00
26	SULAWESI BARAT	100,000	100,000	100,000	300,000.00
27	KAB/KOTA DALAM WILAYAH SUL-SEL KECUALI KAB.LUWU,KOTA PALOPO & KAB.LUWU TIMUR	100,000	150,000	100,000	350,000.00
28	SULAWESI TENGAH	100,000	100,000	100,000	300,000.00
29	SULAWESI TENGGARA	100,000	100,000	100,000	300,000.00
30	MALUKU	100,000	100,000	100,000	300,000.00
31	MALUKU UTARA	100,000	100,000	100,000	300,000.00
32	P A P U A	150,000	200,000	100,000	450,000.00
33	IRIAN JAYABARAT	150,000	150,000	100,000	400,000.00

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAH KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA. BADAN	<i>[Signature]</i>
KABID / SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KASUBID / KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Lampiran 2 Peraturan Bupati Luwu Timur
 Nomor : 03 Tahun 2008
 Tanggal : 09 Mei 2008

A. STANDAR BIAYA PENGINAPAN

NO.	DAERAH TUJUAN	BUPATI,WAKIL BUPATI,PIMPINAN & ANGGOTA DPRD & ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF & PTT
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	500,000	350,000	250,000	200,000
2	SUMATERA UTARA	550,000	400,000	300,000	200,000
3	R I A U	550,000	400,000	300,000	200,000
4	KEPULAUAN RIAU	450,000	350,000	200,000	150,000
5	J A M B I	500,000	300,000	200,000	150,000
6	SUMATERA BARAT	600,000	400,000	300,000	250,000
7	SUMATERA SELATAN	500,000	350,000	250,000	200,000
8	LAMPUNG	400,000	350,000	300,000	200,000
9	BENGKULU	400,000	350,000	300,000	200,000
10	BANGKA BELITUNG	400,000	350,000	250,000	150,000
11	BANTEN	500,000	400,000	300,000	200,000
12	JAWA BARAT	600,000	450,000	350,000	250,000
13	D.K.I. JAKARTA	700,000	550,000	400,000	300,000
14	JAWA TENGAH	600,000	450,000	350,000	250,000
15	D.I. YOKYAKARTA	550,000	400,000	300,000	200,000
16	JAWA TIMUR	600,000	450,000	350,000	250,000
17	BALI	1,100,000	850,000	700,000	450,000
18	NUSA TINGGARA BARAT	600,000	450,000	300,000	200,000
19	NUSA TINGGARA TIMUR	500,000	350,000	250,000	200,000
20	KALIMANTAN BARAT	500,000	350,000	250,000	200,000
21	KALIMANTAN TENGAH	500,000	350,000	250,000	200,000
22	KALIMANTAN SELATAN	500,000	400,000	250,000	150,000
23	KALIMANTAN TIMUR	650,000	500,000	350,000	200,000
24	SULAWESI UTARA	600,000	500,000	350,000	200,000
25	GORONTALO	500,000	450,000	300,000	150,000
26	SULAWESI BARAT	500,000	400,000	300,000	150,000
27	KOTA MAKASSAR	650,000	500,000	350,000	200,000
28	SULAWESI TENGAH	500,000	400,000	300,000	150,000
29	SULAWESI TENGGARA	500,000	400,000	300,000	200,000
30	MALUKU	450,000	300,000	200,000	150,000
31	MALUKU UTARA	450,000	300,000	200,000	150,000
32	P A P U A	600,000	450,000	350,000	250,000
33	IRIAN JAYABARAT	500,000	400,000	300,000	200,000

B. UANG REPRESENTASE PER HARI

BUPATI / WAKIL BUPATI	200,000
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD / ESELON II	100,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN PENGELOLAH KEUANGAN ASSET DAERAH
 PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. BADAN	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG	

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Lampiran 3 Peraturan Bupati Luwu Timur
 Nomor : 03 Tahun 2008
 Tanggal : 09 Mei 2008

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
 KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)	PP (KM)	s/d 1.500 cc (Liter)	s/d 1.800 cc (Liter)	s/d 2.000 cc (Liter)	s/d 3.200 cc (Liter)
1		3	4	5	6	7	8
1	MAKASSAR	574 KM	1.148	164	191	230	287
2	MAROS	544 KM	1.088	155	181	218	272
3	PANGKEP	523 KM	1.046	149	174	209	262
4	BARRU	472 KM	944	135	157	189	236
5	PARE-PARE	349 KM	698	100	116	140	175
6	PINRANG	392 KM	784	112	131	157	196
7	SIDRAP	386 KM	772	110	129	154	193
8	SENGKANG	504 KM	1.008	144	168	202	252
9	SOPPENG	506 KM	1.012	145	169	202	253
10	BONE	600 KM	1.200	171	200	240	300
11	SINJAI	794 KM	1.588	227	265	318	397
12	GOWA	585 KM	1.170	167	195	234	293
13	TAKALAR	619 KM	1.238	177	206	248	310
14	JENNEPONTO	665 KM	1.330	190	222	266	333
15	BANTAENG	294 KM	588	84	98	118	147
16	BULUKUMBA	627 KM	1.254	179	209	251	314
17	SELAYAR	627 KM	1.254	179	209	251	314
18	TATOR	264 KM	528	75	88	106	132
19	ENREKANG	338 KM	676	97	113	135	169
20	MASAMBA	250 KM	240	71	83	100	125
21	KOTA PALOPO	184 KM	368	53	61	74	92
22	LUWU	244 KM	488	70	81	98	122
23	KOLAKA (SULTRA)	520 KM	1.040	149	173	208	260
24	POSO, MOROWALI BUNGKU (SULTENG)	620 KM	1.040	149	173	208	260
25	MAMUJU (SULBAR)	570 KM	1.140	163	190	228	285

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN PENGELOLAH KEUANGAN ASSET DAERAH
 PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA. BADAN	<i>[Signature]</i>
KABID / SEKRETARIS <i>Alemtanri / Hukun</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBID / KASUBAG <i>Parene. Anggarn</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
 H. ANDI HATTA M.

Lampiran 4 Peraturan Bupati Luwu Timur
 Nomor : 03 Tahun 2008
 Tanggal : 09 Mei 2008

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	URAIAN	LUMPUSUM/HARI			
		ZONA 1	ZONA II	ZONA III	ZONA V
		KEC. BURAU, WOTU, TOMONI, MANGKUTANA, KALAENA., NUHA, TOWUTI	KEC. TOMONI TIMUR, ANGKONA, WASPONDA	KEC. TOWUTI (SEBERANG DANAU)	KEC. MALILI (RADIUS 5 Km BATAS KOTA)
1	BUPATI & KETUA DPRD	300,000	250,000	225,000	200,000
2	WAKIL BUPATI & WAKIL KETUA DPRD	250,000	225,000	200,000	150,000
3	ESELON II A & ANGGOTA DPRD	225,000	200,000	175,000	125,000
4	ESELON IIB	200,000	175,000	150,000	150,000
5	ESELON III	175,000	150,000	125,000	100,000
6	ESELON IV	150,000	125,000	110,000	75,000
7	STAF & PTT	100,000	100,000	100,000	50,000
8	KENDARAAN AIR			1,000,000	

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

NO	URAIAN	LUMPUSUM/HARI		
		ZONA 1	ZONA II	ZONA III
		KEC. BURAU, WOTU, TOMONI, MANGKUTANA, KALAENA, NUHA, TOWUTI, TOMONI TIMUR, ANGKONA, WASPONDA.	KEC. TOWUTI (DESA LOREHA)	KEC. MALILI (RADIUS 5 Km BATAS KOTA)
1	CAMAT	50,000	40,000	50,000
2	SEKCAM/KA. PUSKESMAS	35,000	30,000	40,000
3	KASI/KASUBAG	30,000	25,000	30,000
4	STAF/PTT & STAF PUSKESMAS	25,000	20,000	25,000

C. LUMPUSUM UANG HARIAN KE KABUPATEN LUWU, KOTA PALOPO DAN KABUPATEN LUWU UTARA

NO	KAB/KOTA	JUMLAH
1	LUWU	250.000
2	PALOPO	225.000
3	LUWU UTARA	200.000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN PENGELOLAH KEUANGAN ASSET DAERAH
 PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA. BADAN	<i>[Signature]</i>
KABID / SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KASUBID / KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Lampiran 5 Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor : 03 Tahun 2008
Tanggal : 09 Mei 2008

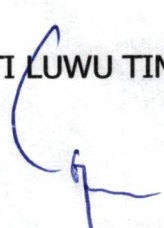
STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS KELUAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	TUJUAN	BIAYA TIKET
1	2	3
1	JAKARTA DAN JAWA BARAT	1.500.000
2	JOGJAKARTA DAN JAWA TENGAH	1.250.000
3	SURABAYA DAN WILAYAH LAINNYA BALI, NTT DAN NTB	1.000.000
4	PALU WILAYAH SULAWESI TENGAH LAINNYA DAN KENDARI	750.000
5	MANADO DAN GORONTALO	1.300.000
6	AMBON DAN SEKITARNYA	1.250.000
7	JAYAPURA DAN WILAYAH IRIAN LAINNYA	2.500.000
8	WILAYAH KALIMANTAN	850.000
9	MEDAN DAN WILAYAH SUMATRA UTARA LAINNYA	2.700.000
10	PADANG, RIAU, BATAM DAN WILAYAH SUMATRA BARAT LAINNYA	1.750.000
11	PALEMBANG DAN WILAYAH SUMATRA SELATAN LAINNYA	1.850.000
112	DAERAH ISTIMEWA ACH	3.000.000
13	SOROAKO-MAKASSAR	900.000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAH KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMİKAB LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. BADAN	
KABID / SEKRETARIS <i>Alentoni / Hutan</i>	<i>ps / as</i>
KASUBID / KASUBAG <i>Desone. Anggana</i>	<i>k.</i>

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.